

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

-----, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Edisi V, Yogyakarta, 2000.

Adi Sulistiyono dan sharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok : Prenadamedia Group, 2018

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Agustina, Shinta. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok : Themis Book. 2014

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hal. 214

Andi Sofyan dan Nur Azisah, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016

Ariman, H.M. Rasyid dan FahmiRaghib. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press. 2015

Asep N. Mulyana, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia*, Semarang : Aneka lmu, 2010

Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta : Grasindo, 2020

Asep N. Mulyana. *Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis*.

Jakarta Gramedia Widiasarana Indonesia. 2019

Atmasasmita, R. , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2010

Azis Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Babinkum TNI. *KUHPM dan KUHDT*. Bandung : Markas Besar Tentara

Republik Indonesia. 2011

Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan*

*Optimalisasi)*. Sinar Grafika, Jakarta. 2016

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana :*

*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana* . Penerbit Fakultas Hukum

Undip, 1984, Hal. 37

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, London : Thomson Reuters, 2019

Buaton, Tiarsen. *Peradilan Militer Di Indonesia Dibawah Kekuasaan*

*Mahkamah Agung Demi Keadilan-Antologi Hukum Pidana dan Sistem*

*Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Kemang. 2016

Cassese, A., *Cassese's nternational criminal law*. Oxford university press,

2013.

Chazawi, A. *Tindak Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022

Cresswell, J.W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di*

*antara Lima Pendekatan (Edisi Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Darwan Prints, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Medan, 2003
- Efendi, J. *Hukum dan kearifan lokal*. Jakad Media Publishing, 2018.
- Febby Mutiara Nelson. *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers, 2020
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Halim, Hamzah. *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta. Kencana. 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2017.
- J.E.Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1979
- Jan S. Maringka, *Reformasi Kejahatan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan KPK RI 2020”, Jakarta: KPK, 2020, .Hlm. 32.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Bagian Pertama, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta 2014. Hal. 151
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

- Meuthia Ganie-Rochman dan Rochman Achwan. *Sosiologi Korupsi : su, Konsep dan Perdebatan*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2015
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi : Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007
- Muhammad Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Surabaya : Airlangga University Press, 2019
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Edisi , Jakarta, 1993.
- Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. 249.
- Pakpahan, N. H., & Prasetyo, T. *Urgensi Pembaruan Peraturan Persidangan Pidana Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*. K-Media. 2022
- Palmer, Vernon Valentine, Mohamed Y. Mattar dan Anna Kopel. *Juris Diversitas, Mixed Legal Systems, East and West*. London : Routledge. 2016
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. 2008.

- Plessis, Paul J. Du, Clifford Ando dan Kaius Tuori. *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*. New York : Oxford University Press. 2016
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang : Unissula Press, 2012
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*-Ed 1, Cet. 6, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Salam, Moch. Faisal, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1994
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, *Bahan Ajar Hukum Pidana Militer*, Fakultas Hukum UNSRAT Manado, tanpa tahun, hlm. 51
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta : Medpress Digital, 2013
- Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007

Yasmirah Mandasari Saragih, *Pengendalian Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*, Cattleya Darmaya Fortuna, 2021

## **B. Jurnal**

Adelina, F., “Bentuk-bentuk korupsi politik”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No 1, 2019, Hlam. 59-75.

Bambang Waluyo. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2, 169 -182

Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.

Chiesa, L. E. (2018). Mens rea n comparative perspective. *Marq. L. Rev.*, 102, 575.

Dessy Debrilianawati, W., Saleh, C., & Hadi, M. (2013). Peran Dan Koordinasi Antar nstansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).

DP, S. H. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 4(1), 24-48.

Dwipayana, S., & Ariawan, . G. K. Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia. *Kertha Semaya*, Vol 9, No 3, 2021

Edy, Slamet Sarwo. "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 105-128.

Fitriana, M. K. "Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil". *Arena Hukum*, Vol 7, No 2, 2014, Hlm.270-286.

Furqan, H., & Sidiq, M. (2019). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas B Kota Sigli). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1), 71-89.

Gani, R. A. (2018). Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer. *Jurnal Imiah Universitas Batanghari Jambi*, 12(1), 72-75.

Hajdin, N. R., "The actus reus of the crime of aggression". *Leiden Journal of International Law*, Vol 34, No 2, 2021, Hlm. 489-504.

Hakim, M. R. A., & Rahaditya, R. (2021). Kepastian Hukum Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Perkara Koneksitas Terhadap Penyerangan Polsek Ciracas (Putusan Dilmil 08 Jakarta No. 232-K/PM.-08/AD/XII/2020–Tanggal 29 April 2021). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4615-4634.

Hakim, M. R. A., & Rahaditya, R. "Kepastian Hukum Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Perkara Koneksitas Terhadap Penyerangan Pol". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4, No 2, 2021, Hlm.4615-4634.

Herdjito, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*”, Jakarta : *Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung*, 2014

Ibsaini dan Syahbandir, Mahdi. 2018. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Cita Hukum Universitas slam Negeri Jakarta*. Vol.2 (No.2), 483-502

International Bar Association, “isks and threats of corruption and the legal profession. *Anti-Corruption Strategy for the Legal Profession*. 2010

Isra, S., Amsari, F., & Tegnani, H. “Obstruction of justice n the effort to eradicate corruption n Indonesia”. *nternational Journal of Law, Crime and Justice*, Vol 51, 2017, Hlm. 72-83.

Jurjo, F. A., Firdaus, E., & Erdiansyah, e. Eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 6(2), 1-15.

Keni, L. (2021). Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(7).

Khurramovich, K. F., “The objective side of crime n the theory of criminal law and ts significanc”. *Modern scientific challenges and trends, Sciencecentrum*. Vol 2, No 36, 2021, 122.

Kurniawati, E., Adwani, A., & Mujibussalim, M. “Kewenangan Pengadilan Militer –01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang



Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh”. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 2, No 2, 2018, Hlm. 216-232.

Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. “Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol 3, No 9, 2022, Hlm. 1507–1521

Mau, H. A., & Sinaulan, R. L. “Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol 15, No 1. (2021).

Muchtar, S., & Muin, A. M. “Kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan single prosecution system”. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 11 Nomor 1, 2022, Hlm. 1-14

Muh rfan, Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin., Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan *Single Prosecution System*, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2022, 2615-5567

Muntaha, Hanny Amelia, dan Novi E Baskoro. Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*. Vol.4 No. 1. April 2021, 2654-272

Pakpahan, N. H., & Gaol, Y. R. C. L. “Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum atau Kepentingan Militer

Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas”. *Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol 1, No 02, 2022, Hlm.37-46.

Pananjung, M. D. P., Chairunnisa, P., & Triayu, R. (2017). Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip Reward-and-Punishment dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas. *Padjadjaran Law Review*, 5.

Pangestuti, E. 2020 .“Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Residivis”. *Yustitiabelen*. 6(2),76-97

Poli, R. K. “Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi”. *Lex Privatum*, Vol 5, No 10, 2017, Hlm. 19–26.

Prabandari, P. N., Sugiarta, . N. G., & Widyantara, . M. M. “Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas”. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 4 No 2, 2022, Hlm. 182-186.

Pramono, R. Widyo, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa Dan Guru Besar*, (Jakarta: Kompas, 2017).Stepen Huwitz, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86

Priyono, E. A., & Benuf, K. (2020). Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 2(1), 54-70.

Putu Nadya Prabandari, Nyoman Gede Sugiarta dan Made Minggu Widyantara, “Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam

Penanganan Perkara Koneksitas”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4. No. 2  
Tahun 2022; 182-186

Rahayu, D., & Prakasa, S. U. W. “Accountability of Military Members as  
Perpetrators of Corruption in Defense Equipment  
Procurement”. *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol 1,  
No1, 2022

Ruhayat, S. M., smansyah, ., & Mulyati, N. The Role Of General Attorney in  
Eradication Of Corruption By Corporation. *Diponegoro Law Review*, Vol  
4, No 2, 2019 152-166.

Rumate, P. V. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang  
Dilakukan Oleh Militer”. *LEX ADMINISTRATUM*, Vol 11, No 1, 2023

Sahuri Lasmadi, 2010. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak  
Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal mu  
Hukum Universitas Jambi*

Salamba, R. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam  
Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 kuhap”. *lex crimen*, Vol 7, No 1,  
2018

Saragih, Y. M., & Medaline, O. “Elements of the corruption crime (element  
analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in  
Indonesia)”. in *OP Conference Series: Earth and Environmental  
Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). OP Publishing. 2018

Sari, A. R. F., & Suheryadi, B. "The Authority Of Military Court n Prosecuting Retired Members Of Indonesian National Army". *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol, 17, N0 4, 2020, Hlm.2320-2332.

Sofyan, Andi dan Nur Azisah. Hukum Pidana. Makassar. Pustaka Pena Press. 2016.

Soniardhi, Soniardi. "Kewenangan Ankum Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 464-477.

Sugiarto, "Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika." *Udayana Master Law Journal* 7, no. 2 (2018): 165-176.

Syamsuddin, A., "Kajiantentanganggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuhap". *Lex Crimen*, Vol 6, No 6, 2017

Tambunan, D. G. "Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer". *Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer*, (ii, 10p), 2019, Hlm 1-10.

- Topo Santoso. "Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance", *Penulisan Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta, 2011*
- Utami, N. S. B., & Supriyadi. "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 3, No 2, 2014, Hlm. 100–107.
- Wahyudi, Misran. "Analisis Independensi Oditur Militer dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer I-14 Denpasar dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan." *Udayana Master Law Journal* 4, no. 3 (2015): 145-157.
- Wahyuningsih, S. E., & Sunaryo, A. "The Role of Prosecutor Office in The Eradication Of Corruption Criminal Acts in Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 4, No 2, 2017, Hlm.244-254.
- Warner, C. M., & Armstrong, M. A. "The role of military law and systemic issues in the military's handling of sexual assault cases". *Law & Society Review*, Vol 54, No 1, 2020, Hlm. 265-300.
- Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018): 238-249
- Wijana, K., Sepud, . M., & Dewi, A. A. S. L., "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer". *Jurnal Analogi Hukum*, 2, No 3, 2020, Hlm. 404-408.

Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y., “The Role Of  
ndictment Of Public Prosecutor n Eradication Of The Case Of  
CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System”. *Rechtidee*, 14, Vol,  
No 2, 2019, Hlm. 263-287.

Yuliana, Y., & Prasetyo, M. H. “Criminal Accountability Of State Officials  
Committing Political Corruption n Indonesia”. *Arena Hukum*, Vol 15, No  
1, 2022, Hlm.160-175.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tnetang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tnetang Pemberantasan Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### **D. Tesis/disertasi**

Apriadi, H. “*Tinjauan Terhadap Fungsi Oditur Militer Dalam Proses Perkara  
Koneksitas Di Lingkungan Peradilan Militer* (Doctoral dissertation,  
UAJY). 2009.

Bustommy, A.,” Kedudukan perkara koneksitas dalam Pasal 89/94 UU. no. 8 tahun 1981 KUHAP dan Pasal 198/203 UU. no. 31 tahun 1997 peradilan militer dalam perspektif hukum acara peradilan slam” (*Doctoral dissertation, AIN Sunan Ampel Surabaya*), 2009.

EMBEN, P. A. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengirimkan Laporan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuannya Yang Sebenarnya Terkait Atasan Oleh Aparat Prajurit Tni Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan DILMIL I-17 Manado Nomor 24-K/PM I-17/AD/I/2018) (*Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*), 2019

Handoko, H. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (*Doctoral dissertation, Universitas slam Sultan Agung Semarang*), 2021

Muchtar, S., & Muin, A. M. , Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System.*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Pratama Sandi, D. (2016). *Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer JUNCTO Tentara Nasional Indonesia* (*Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*).

Sagala, C. P. Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas. *Tesis*. 2020

Setyawan, D. “Analisis Putusan Perkara Koneksitas Tentang Pencurian Yang Dilakukan Anggota Polri Bersama Dengan Warga Sipil” (Studi Terhadap Putusan Nomor: 2730/Pid. B/2001). 2010

Zainal, A. Z. “*Penanganan Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2015/2016)* (Doctoral dissertation, Universitas slam Negeri Alauddin Makassar)., 2017.

#### **E. Internet**

Rofiq Hidayat, “Pengaturan Perpres Pembentukan Struktur Jampidmil”, Hukum Online, Oktober 22, 2021. Diakses 18 November 2022

Man-Wai, T. K. (2009). Investigation of corruption cases. *Disponível na internet*: [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS N, 79](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_N_79).

Interpol. Corruption. diakses tanggal 24 November 2022, <https://www.interpol.int/en/Crimes/Corruption>

The World Bank. "Combating Corruption. 2022 <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption>